



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZUL NASRI
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 962086

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **755.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1115 m2/117 m2 di KAB / KOTA SOLOK SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA SOLOK SELATAN, WARISAN Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA SOLOK SELATAN, WARISAN Rp. 60.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 24 m2/18 m2 di KAB / KOTA PADANG PARIAMAN, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
5. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA SOLOK SELATAN, WARISAN Rp. 50.000.000
6. Tanah Seluas 17000 m2 di KAB / KOTA SOLOK SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **44.000.000**

1. MOTOR, HONDA/BEAT METIC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA/VARIO METIC Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, YAMAHA/VEGA MANUAL Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000



4. MOTOR, AEROX ALPHA CYBER CITY METIC Tahun 2024, HASIL
SENDIRI Rp. 35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	24.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	81.752.500
F. HARTA LAINNYA	Rp.	18.500.000
Sub Total	Rp.	923.252.500
III. HUTANG	Rp.	357.251.540
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	566.000.960

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.